

**EDUKASI AKUNTANSI KEUANGAN TERKAIT DENGAN PSAK 1 TENTANG  
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PSAK 26 TENTANG BIAYA  
PINJAMAN KEPADA PEGAWAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PAJAK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**Zef Arfiansyah<sup>1)</sup>; Tjahjo Winarto<sup>2)</sup>, Amrie Firmansyah<sup>3)\*</sup>**

<sup>1)</sup> *zef.arfiansyah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>2)</sup> *cahyowin@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

<sup>3)</sup> *amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

*\*email korespondensi*

**Abstract**

*This Community Service (PKM) activity is carried out to educate employees of the Regional Office of the Directorate General of Taxes in South Sumatra and Bangka Belitung (Indonesia Regional Tax Office for South Sumatra Babel) regarding materials for preparing financial statements and borrowing costs based on Financial Accounting Standards applicable in Indonesia. The implementation method consists of three stages: the preliminary stage in the form of an internal meeting to discuss technical activities and materials and a preparatory meeting with representatives of the Indonesia Regional Tax Office for South Sumatra Babel. The second stage is implementing activities carried out using Zoom media. The last stage is monitoring material-related consultation between participants and the team. This PMK activity is useful in understanding financial statement preparation and borrowing costs.*

**Keywords:** *Borrowing Fees, Education, Accounting Standards, Financial Statements*

**Abstrak**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel) terkait materi penyusunan laporan keuangan dan biaya pinjaman berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pendahuluan berupa rapat internal pembahasan teknis kegiatan dan materi, rapat persiapan dengan perwakilan pegawai Kanwil DJP Sumsel Babel. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media Zoom. Tahap terakhir adalah monitoring terkait dengan konsultasi terkait materi antara peserta dan Tim. Kegiatan PKM ini berguna dalam meningkatkan pemahaman pegawai terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan biaya pinjaman.

**Kata Kunci :** *Biaya Pinjaman, Edukasi, Standar Akuntansi, Laporan Keuangan*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari komitmen Indonesia untuk melakukan adopsi *International Financial Reporting Standar (IFRS)* maupun *International Accounting Standard (IAS)* yang disusun oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* (Bharata et al., 2020). Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS berdasarkan prinsip, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Firmansyah & Irawan, 2018). Sebagai anggota G-20, Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan IFRS secara penuh (Iaiglobal, 2016). Kondisi ini juga didasarkan pada hasil *Report on the Obeservance Standard and Codes of Accounting and Auditing (ROSC AA)* yang menyatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya melakukan adopsi atas IFRS (Kemenkeu, 2011). Implementasi, masih terdapat inkonsistensi penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di beberapa aspek. Oleh karena itu, pemahaman atas standar akuntansi keuangan perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang menggunakan standar tersebut dalam bidang pekerjaannya.

Politeknik Keuangan Negara STAN yang merupakan institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi keuangan. Sejalan dengan tridarma pendidikan yaitu pengabdian kepada masyarakat, PKN STAN perlu mendiseminasikan pengetahuan akuntansi keuangan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Salah satu pihak yang terkait dengan implementasi standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah

pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan terkait dengan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan).

Sebagai salah satu instansi yang berhubungan dengan entitas bisnis, maka pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak perlu memahami standar yang digunakan oleh entitas bisnis di dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu standar yang digunakan oleh entitas bisnis tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan. PSAK ini telah mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada *International Accounting Standards (IAS) 1 Presentation of Financial Statements* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Terakhir kali, PSAK ini diubah pada tanggal 26 Juni 2019, di mana pengaturan di dalam naskah revisi ini berlaku untuk laporan keuangan 1 Januari 2020 dan setelah periode tersebut. Secara umum, PSAK ini mengatur mengenai persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Dengan memahami pengaturan ini, maka pengguna laporan keuangan dapat memahami bisnis suatu entitas dan kondisi keuangan suatu entitas tersebut.

Selain PSAK 1, terdapat juga PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman yang mengalami revisi pada tahun 2018. Revisi PSAK ini berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2019 dan setelah periode tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Dalam PSAK ini diatur bagaimana entitas bisnis memperlakukan biaya pinjaman yang terjadi untuk memperoleh persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tidak berwujud, atau properti investasi yang membutuhkan waktu panjang untuk mempersiapkannya sesuai dengan maksud dan tujuannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Secara umum PSAK ini mengatur bahwa biaya pinjaman yang terjadi dapat dikapitalisasi ke dalam aset yang diperoleh (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pemahaman atas kedua PSAK ini akan membantu dalam melakukan penyuluhan, pemeriksaan maupun untuk menangani keberatan atau banding dari wajib pajak. Dengan pemahaman ini, pegawai dimaksud akan mampu mengambil posisi apakah suatu pendapatan bisa diakui sebagai objek pajak (*taxable income*) atau apakah suatu beban dapat diakui sebagai pengurang (*deductable expenses*) di dalam menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.

Politeknik Keuangan Negara STAN yang merupakan institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seorang dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi yaitu, pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2012). Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting. Elemen pengabdian kepada masyarakat tersebut menjadi aksi dari keterlibatan dosen dan perguruan tinggi dalam pembangunan dan menghilangkan isolasi dunia akademik terhadap persoalan masyarakat. Sejalan dengan tridarma pendidikan yaitu pengabdian kepada masyarakat, PKN STAN perlu mendiseminasikan pengetahuan akuntansi keuangan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Dengan adanya pengabdian ini, baik masyarakat maupun perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat. Perguruan Tinggi akan mendapatkan pembelajaran dari masyarakat tentang realitas kehidupan dan masyarakat juga akan mendapatkan bekal untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan dalam kehidupannya.

Sebagai salah satu unsur masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel) mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan

tugasnya, Kanwil DJP memerlukan pegawai yang memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan oleh entitas bisnis di dalam menyusun laporan keuangannya.

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan edukasi akuntansi terkait dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN sebagai perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan negara menyelenggarakan Webinar Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Akuntansi Biaya Pinjaman Sesuai Dengan PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman untuk para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel Babel). Kegiatan PKM sebelumnya berupa edukasi akuntansi terkait standar akuntansi keuangan dilakukan dengan objek usaha mikro, kecil dan menengah (Firmansyah et al., 2019; Solikin, 2020), organisasi nirlaba (Effendi, 2021). Adanya pandemi covid19 yang masih terjadi di tahun 2021, mengakibatkan kegiatan PKM ini dilakukan secara virtual melalui media Zoom. Kegiatan PKM lainnya yang telah dilakukan secara virtual dengan konsep web seminar di antaranya adalah (Firmansyah et al., 2021; Firmansyah, Arham, et al., 2020; Firmansyah, Qadri, et al., 2020b, 2020a; Qadri et al., 2020; Wardhana et al., 2020).

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pendahuluan berupa rapat internal pembahasan teknis kegiatan dan materi, serta rapat persiapan dengan perwakilan pegawai Kanwil DJP Sumsel Babel. Dalam tahap ini, Tim PKN STAN mengidentifikasi kebutuhan materi bagi calon peserta, menyiapkan materi dan pembagian kewajiban masing-masing anggota Tim. Selain itu, terdapat rapat antara anggota Tim PKM dan perwakilan pegawai Kanwil DJP Sumbel Babel membahas persamaan persepsi terkait dengan materi yang dibutuhkan bagi pegawai dalam kegiatan PKM dan memetakan kemampuan pegawai terkait dengan kemampuan dan pengetahuan akuntansi secara umum. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media Zoom. Kegiatan dilakukan diawali dengan kuisisioner awal atas pengetahuan pegawai terkait dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, pemaparan materi oleh masing-masing anggota Tim kepada peserta PKM, dan dilanjutkan dengan diskusi. Tahap terakhir adalah monitoring terkait dengan konsultasi pertanyaan lanjutan atas materi PSAK 1 dan PSAK 26. Tim memberikan *link* pertanyaan kepada seluruh peserta apabila membutuhkan pertanyaan lanjutan. Anggota Tim menjawab pertanyaan lanjutan yang disampaikan melalui *link* yang sama.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan identifikasi pada tahap perencanaan yaitu dalam rapat antara anggota Tim PKM dan perwakilan pegawai Kanwil DJP Sumbel Babel diperoleh beberapa informasi yang menjadi pertimbangan terkait dengan pelaksanaan PKM dengan topik ini. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, seringkali terjadi sengketa antara wajib pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang disebabkan antara lain adanya perbedaan perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Apabila terjadi sengketa, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak adalah dengan keberatan/banding/gugatan. Upaya hukum tersebut berada diluar area pengadilan pajak untuk memohon keadilan dalam sengketa pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang secara langsung terkait dengan proses keberatan perlu mendapatkan pemahaman atas proses bisnis wajib pajak dan pengetahuan standar akuntansi yang digunakan oleh wajib pajak dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya ketika terdapat adanya perubahan-perubahan dalam standar akuntansi keuangan.

Dalam tahap pelaksanaan, Tim PKM menyajikan materi PSAK 1 yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami perbandingan laporan keuangan entitas periode sebelumnya dan dengan menyajikan laporan keuangan entitas lainnya, penyajian laporan keuangan untuk kebutuhan umum, yang menguraikan pedoman untuk strukturnya dan mendasari persyaratan minimum atas isinya dan pengungkapannya. Sementara itu, penyajian materi atas PSAK 26 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas kapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan atau dialokasikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut dan saat pembebanan sebagai biaya.

Meskipun tidak terdapat perbedaan di dalam memahami laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi, namun demikian laporan keuangan merupakan dasar bagi perusahaan dalam menentukan besarnya beban pajak dan pajak terutang suatu entitas bisnis. Berdasarkan data-data yang tersaji di dalam laporan keuangan tersebut, perusahaan akan melakukan rekonsiliasi dengan peruturan pajak yang berlaku sehingga akan diperoleh penghasilan kena pajak dan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas bentuk laporan dan komponen laporan yang disajikan di dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan perlu dikonfirmasi, sehingga akan memperkuat posisi pegawai DJP. Terkait dengan biaya pinjaman, pegawai Direktorat Jenderal Pajak masih mendapati banyaknya perusahaan yang tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman kepada biaya perolehan suatu aset. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak melihat bahwa banyak entitas tidak menerapkan PSAK 26 tentang Biaya Pinjaman merupakan upaya mereka untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak perlu memahami bagaimana akuntansi seharusnya memperlakukan biaya pinjaman ini dan bagaimana menentukan biaya pinjaman yang boleh dikapitalisasi. Ketentuan ini diatur di dalam PSAK 26 tentang biaya pinjaman.

Sebelum dilakukan paparan, peserta diminta untuk mengisi survey tingkat pemahaman peserta terhadap PSAK 1 dan PSAK 26. Daftar pertanyaan tersedia pada tautan <https://forms.gle/ti3LNpQ4bpAj3Gkn7>. Di akhir sesi PKM, peserta juga diminta untuk mengisi survey untuk melihat efektivitas webinar yang dilaksanakan. Tautan survey efektivitas webinar dapat diakses pada <https://forms.gle/rBWxN8TgoqD5me6s6>. Setelah kegiatan PKM, peserta yang memerlukan konsultasi atau diskusi lebih lanjut menghubungi Tim PKM melalui slido pada tautan <http://bit.ly/tanyaPSAK> sebagai tahap monitoring kegiatan PKM.

## **SIMPULAN**

Edukasi akuntansi keuangan terkait dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 26 tentang biaya pinjaman yang dilakukan oleh Tim Politeknik Keuangan Negara STAN kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sumsel Babel dilakukan dengan pertimbangan adanya perbedaan persepsi atas penerapan akuntansi keuangan antara wajib pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan standar akuntansi keuangan terkini terkait dengan penyajian laporan keuangan dan biaya pinjaman. Kegiatan PKM selanjutnya dapat menggunakan mitra-mitra PKM lainnya yang membutuhkan peningkatan kemampuan atas penerapan akuntansi keuangan terkini. Selain itu, topik kegiatan PKM selanjutnya dapat mengulas standar akuntansi keuangan lainnya yang dibutuhkan oleh mitra-mitra PKM.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bharata, R. W., Susilo, G. F. A., & Nugraheni, A. P. (2020). International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Proses Pengadopsiannya di Indonesia. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 06(02), 10–26. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/JurnalBisnis/article/view/1951>
- Effendi, B. (2021). Edukasi dan pendampingan akuntansi kader posyandu manggis dan posyandu nanas, Desa Mekarwangi, Kabupaten Tangerang - Banten. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 497–502. <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/905>
- Firmansyah, A., Arham, A., & Nor, A. M. E. (2019). Edukasi akuntansi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–63. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i2.1766>
- Firmansyah, A., Arham, A., & Qadri, R. A. (2020). Pelatihan melalui web seminar terkait penulisan artikel berbasis bibliographical research method dalam bidang akuntansi untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 37–48. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.564>
- Firmansyah, A., & Irawan, F. (2018). Adopsi IFRS, manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i2.3310>
- Firmansyah, A., Irawan, F., Febrian, W., Fasita, E., Jadi, P. H., Sismanyudi, D., & Soekarno, R. S. (2021). Pelatihan implementasi praktik transfer pricing dari sudut pandang akuntansi, pajak, dan hukum. *Jurnal Kuat*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i1.1178>
- Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Arham, A. (2020a). Pelatihan melalui web seminar tentang kiat dan motivasi penulisan artikel hasil penelitian pada jurnal ilmiah. *Intervensi Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 21–27. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IK/article/view/763>
- Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Arham, A. (2020b). Pelatihan melalui Web Seminar terkait Publikasi Artikel untuk Menembus Jurnal Sinta 2 dan Scopus. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(2), 131–138. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i2.4244>
- Iaiglobal. (2016). *Siaran Pers: IAI IFRS conference, perubahan standar keuangan global berpotensi goncang dunia bisnis di Indonesia*. Pers News IAI Global.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *PSAK 26 Biaya Pinjaman*. In Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *PSAK 1 penyajian laporan keuangan*. In Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kemenkeu. (2011). *Pemerintah komit pada IFRS*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-komit-pada-ifrs/>
- Qadri, R. A., Firmansyah, A., Jadi, P. H., & Setiawan, T. A. (2020). Pelatihan penelitian kualitatif melalui web seminar. *Abdi Laksana*, 1(3), 325–330. <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v1i3.6865>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi* (Issue September).
- Solikin, A. (2020). Peningkatan pengetahuan SAK EMKM dua usaha kecil di Kota Jambi Dan Kota Banda Aceh. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 550–560.

<https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.527>

Wardhana, D. E. C., Basuki, R., & Noermanzah, N. (2020). Webinar dan pendampingan daring penulisan artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi bagi guru bahasa indonesia tingkat SMA Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(4), 228. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v26i4.20640>

**Lampiran 1:  
Bukti Pelaksanaan PKM**

**Pertanyaan 1:**

Apabila suatu perusahaan yang seharusnya menggunakan ETAP, apakah boleh menggunakan SAK IFRS?

**Pertanyaan 2:**

Di post mana biasanya disembunyikan oleh WP untuk menyembunyikan biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham?.

**Pertanyaan 3:**

Apakah ada metode khusus untuk menilai laporan keuangan WP yang mengalami kerugian (sudah wajar atau tidak)?

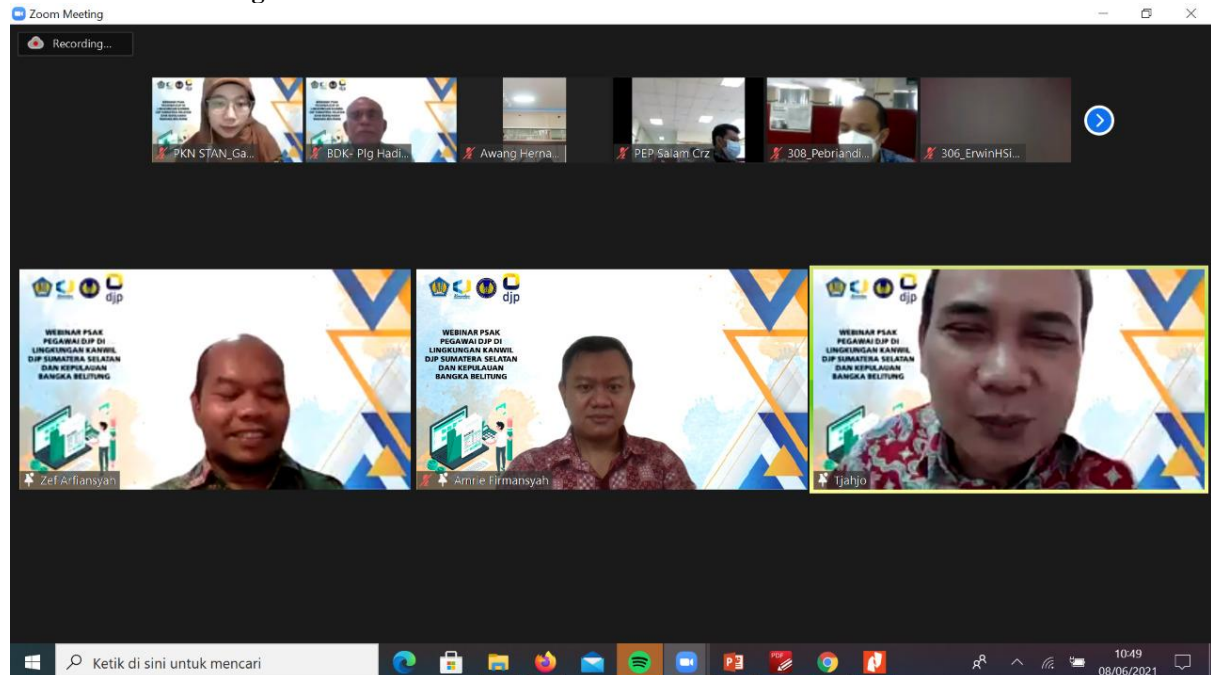
**Pertanyaan 4:**

Apakah laporan keuangan yang opininya wajar tanpa pengecualian pajaknya pasti benar?

**Pertanyaan 5:**

Beban bunga yang dikapitalisasi apakah boleh juga berasal dari bunga pinjaman dari pemegang saham? Bagaimana mengukur kewajaran besaran bunganya dalam PSAK

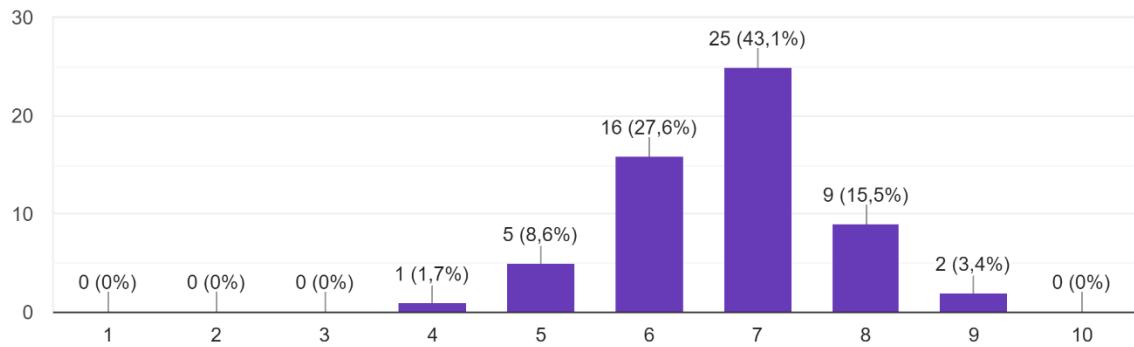
**Foto Pelaksanaan Kegiatan**



Lampiran 2:  
Survey Pendahuluan

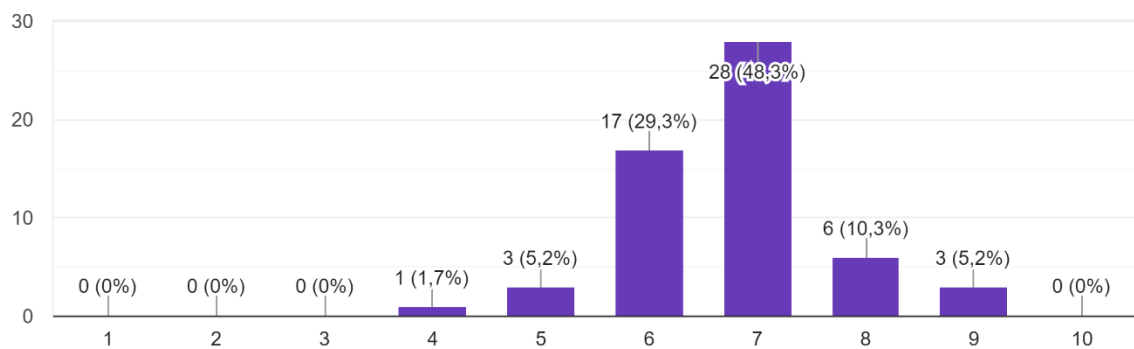
Seberapa baik pemahaman anda atas penyajian laporan keuangan suatu perusahaan?

58 jawaban



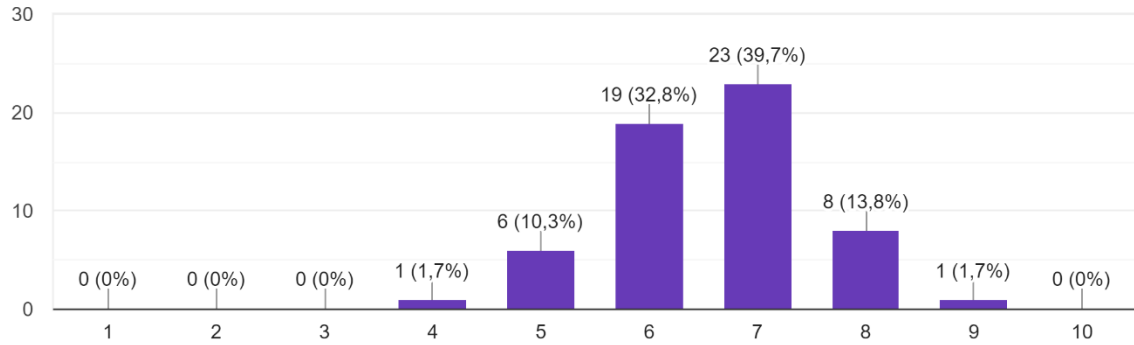
Seberapa baik pemahaman anda terhadap penyajian aset, liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan?

58 jawaban



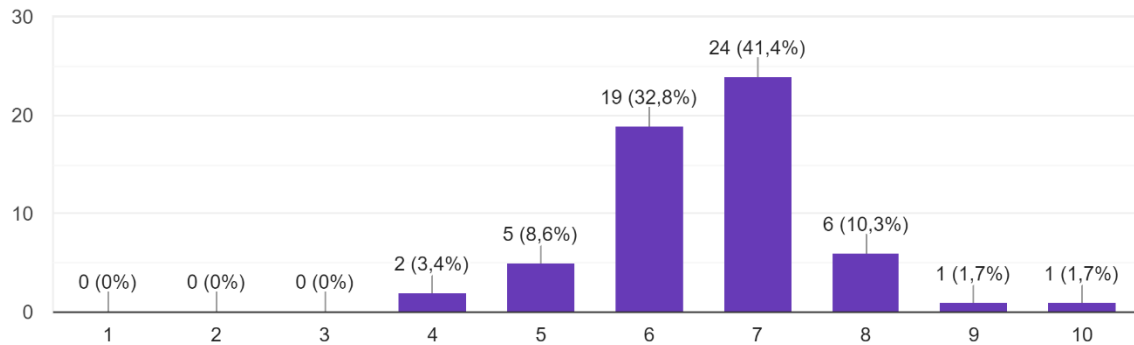
Seberapa baik pemahaman anda terhadap penyajian pendapatan, beban, penghasilan komprehensif lain dalam laporan penghasilan komprehensif

58 jawaban



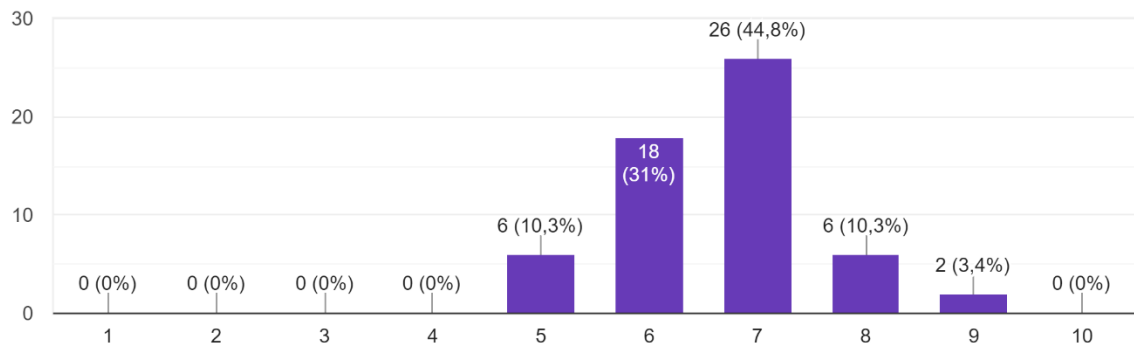
Seberapa baik pemahaman anda terhadap tujuan penyajian laporan perubahan ekuitas?

58 jawaban



Seberapa baik pemahaman anda terhadap tujuan penyajian laporan arus kas?

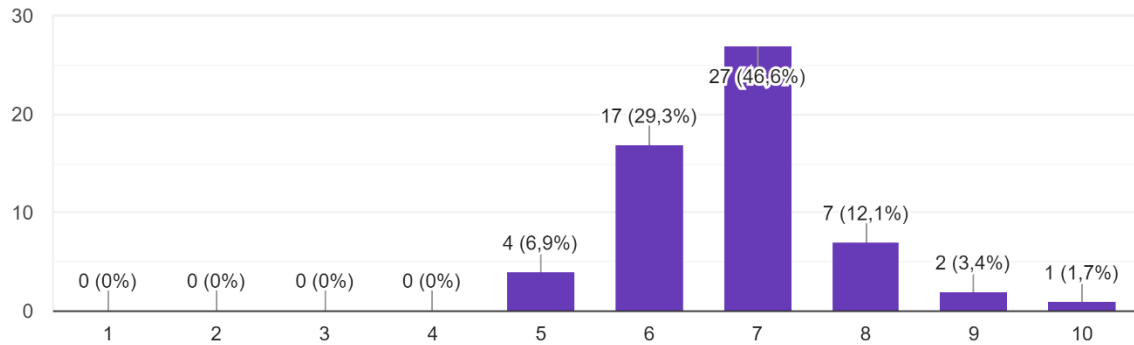
58 jawaban





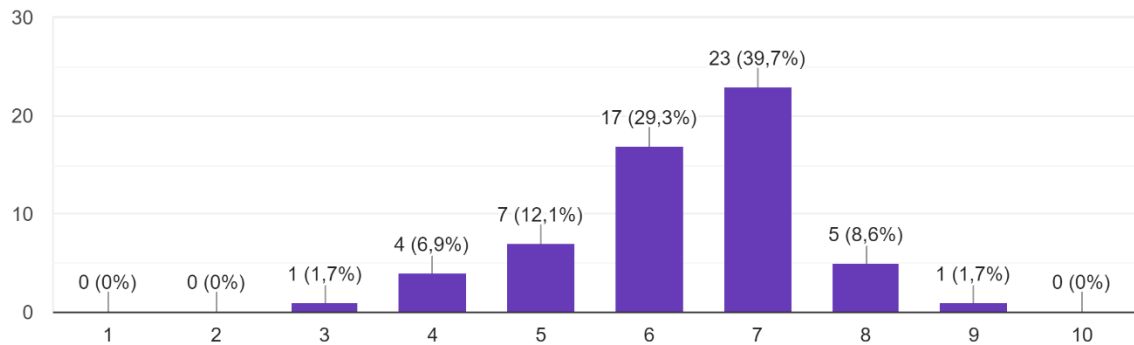
Seberapa baik pemahaman anda atas pentingnya catatan atas laporan keuangan?

58 jawaban



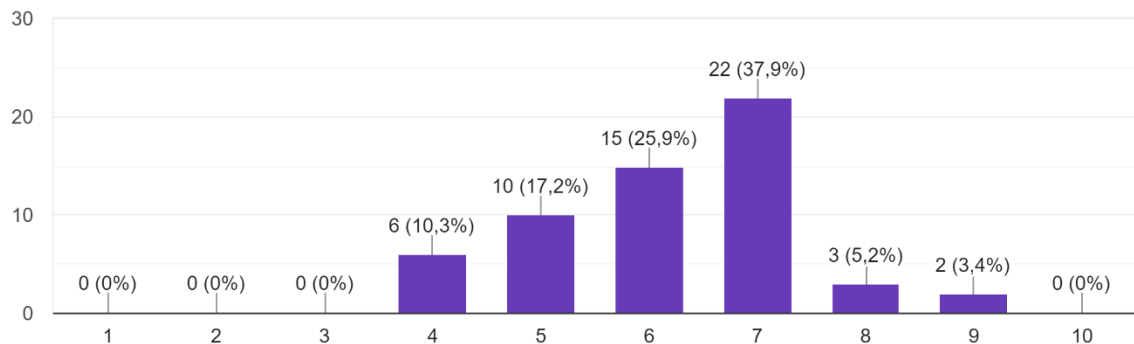
Seberapa baik pemahaman anda terhadap perlakuan biaya pinjaman dalam pengadaan suatu aset?

58 jawaban



Seberapa baik pemahaman anda terkait pengukuran biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi?

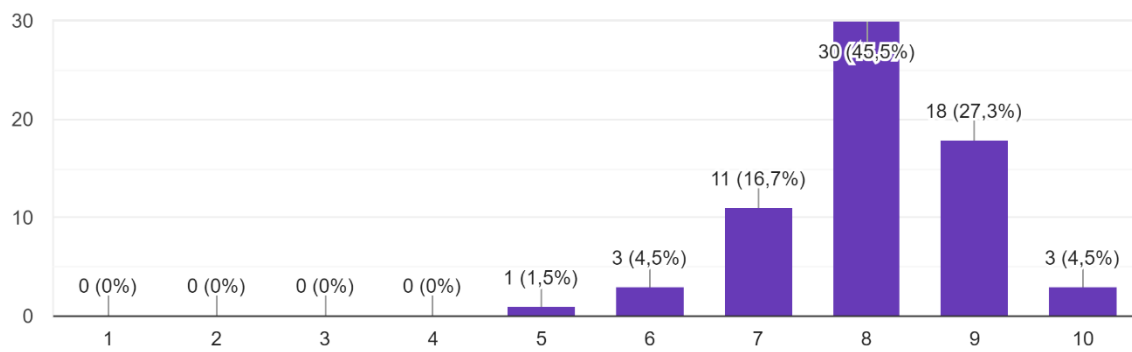
58 jawaban



Lampiran 3:  
Survey Pemahaman Peserta Setelah Webinar

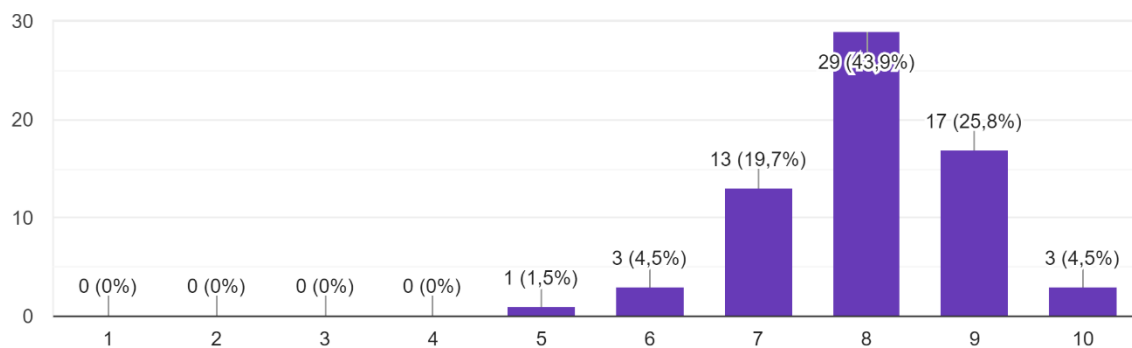
Seberapa baik pemahaman anda atas penyajian laporan keuangan suatu perusahaan?

66 jawaban



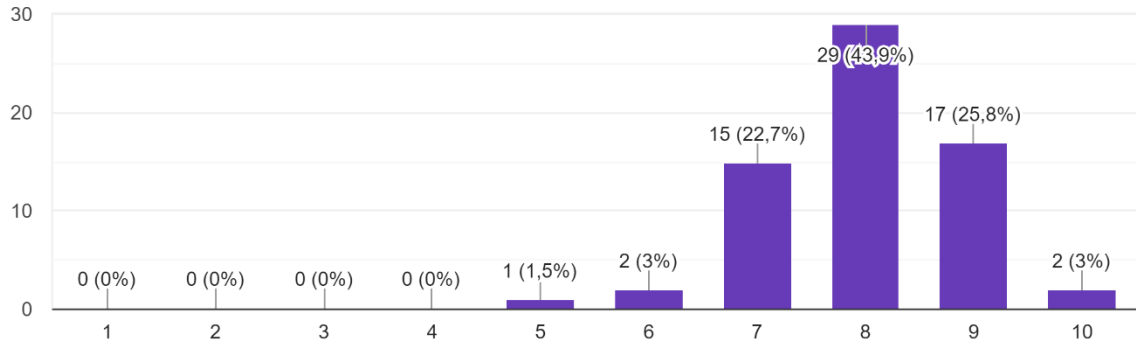
Seberapa baik pemahaman anda terhadap penyajian aset, liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan?

66 jawaban



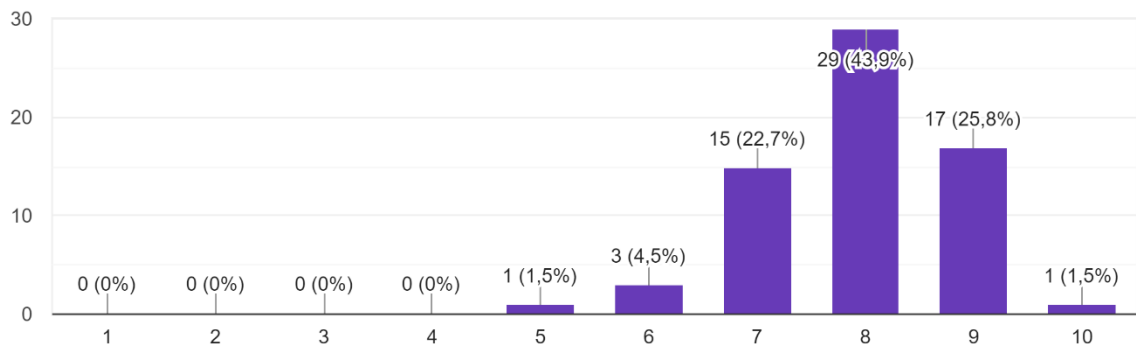
Seberapa baik pemahaman anda terhadap penyajian pendapatan, beban, penghasilan komprehensif lain dalam laporan penghasilan komprehensif

66 jawaban



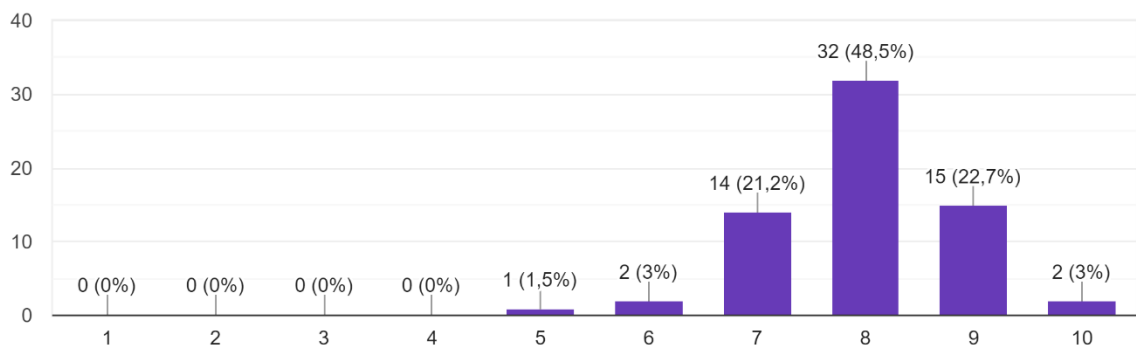
Seberapa baik pemahaman anda terhadap tujuan penyajian laporan perubahan ekuitas?

66 jawaban



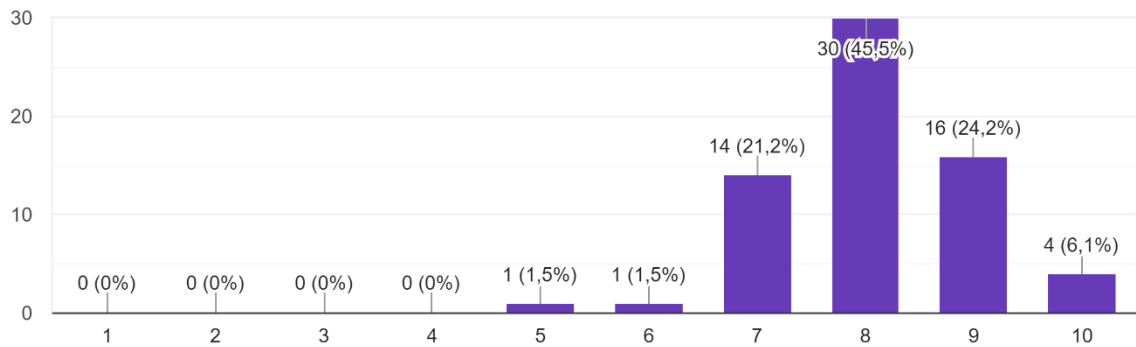
Seberapa baik pemahaman anda terhadap tujuan penyajian laporan arus kas?

66 jawaban



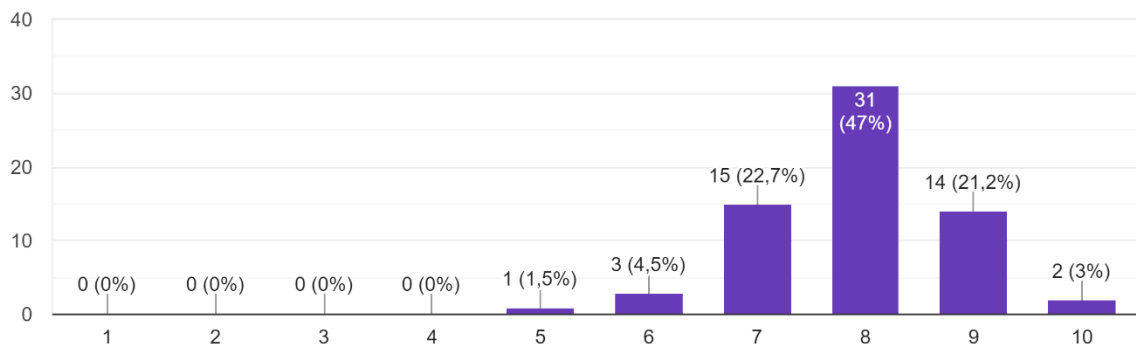
Seberapa baik pemahaman anda atas pentingnya catatan atas laporan keuangan?

66 jawaban



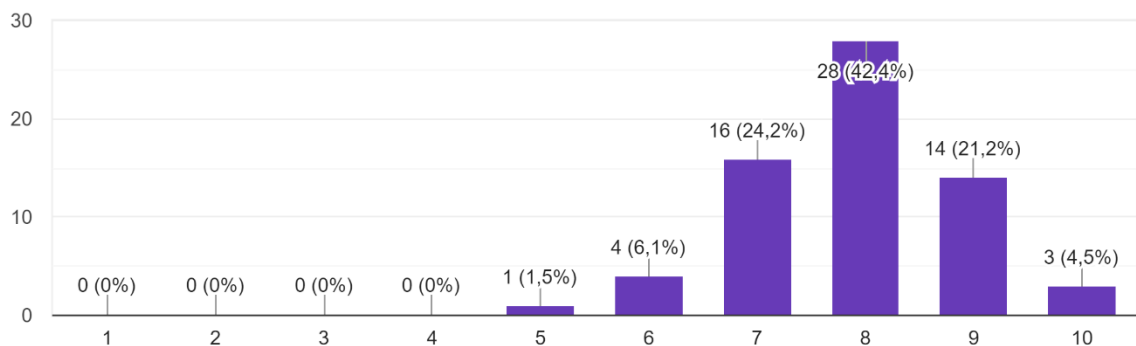
Seberapa baik pemahaman anda terhadap perlakuan biaya pinjaman dalam pengadaan suatu aset?

66 jawaban



Seberapa baik pemahaman anda terkait pengukuran biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi?


66 jawaban




Lampiran 4:  
Konsultasi Setelah Webinar

Replies ×

---

 Anonymous  
👍 0 🕒 8 Jun, 2:21pm 📄

Pak Zef, untuk biaya pinjaman. Untuk contoh tadi, perolehan tanah. Berarti perolehan tanah tidak mungkin ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi ya pak? ...

 Zef Arfiansyah  
🕒 8 Jun, 2:27pm

Oh tidak selalu seperti itu pak. Misal perusahaan membutuhkan waktu untuk membuat tanah bisa untuk dijual/digunakan. Maka bisa dikapitalisasi. Contoh perusahaan membeli sawa untuk area bangunan, tentu banyak proses yang harus dilakukan agar tanah sawah tersebut siap untuk dapat digunakan. ...

[Read more](#) ...

Replies ×

---

 Anonymous  
👍 0 🕒 8 Jun, 2:26pm 📄

Bila perusahaan menyusun biaya berdasarkan fungsi dikatakan harus membuat juga berdasarkan sifat. Ini disajikan dimana ya? ...

 Zef Arfiansyah  
🕒 8 Jun, 2:28pm

Bisa dicek di catatan atas laporan keuangannya pak. Ini merupakan keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkannya. ...

Replies



Anonymous

👍 1 ⌚ 8 Jun, 2:06pm 📄

Apakah suatu perusahaan yang seharusnya menggunakan ETAP justru menggunakan SAK?



Zef Arfiansyah

⌚ 8 Jun, 2:07pm



Boleh pak, SAK ETAP memiliki ketentuan yang lebih ringan dibandingkan dengan SAK sehingga bila menggunakan SAK justru lebih baik. Namun demikian, bila perusahaan sudah memutuskan untuk menggunakan SAK, maka tidak diizinkan untuk mengubah ke SAK ETAP. Tks



Type your reply

0 / 1000